

POTRET BERNEGARA: MENAKAR KEMAJUAN DUNIA ISLAM DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DAN TEOLOGI

Muhammadong

Universitas Negeri Makassar

Email: muhammadong74@yahoo.com

Abstrak

Pemikiran politik Islam dan teologi merupakan bentuk wajah lama dalam dunia Islam dalam mengakselerasikan kemajuan Islam dengan formatnya sendiri. Sistem kenabian yang dicetuskan Muhammad saw dalam bernegara merupakan potret masa depan terbentuknya pemerintahan sampai pada masa khalifah. Namun, potret itu menjadi suram dan berubah drastis setelah sistem khilafah diangkat dipermukaan, pro dan kontra mulai bermunculan dalam sistem pemerintahan dan berujung pada pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh oleh kelompok Muawiyah melalui arbitrase sehingga menjadi cikal bakal munculnya para teolog aliran beragama. Namun kesuksesan dapat diraih dengan adanya gagasan cemerlang yang dimotori oleh pemerintahan Abbasiyah. Melalui ekspansi wilayah dan pengembangan ilmu pengetahuan, Islam mendapatkan kejayaannya sehingga mampu menyaingi dunia Barat.

Kata Kunci:

Potret, Bernegara, Kemajuan, Dunia, Islam

I. PENDAHULUAN

Sejarah Islam mencatat bahwa peradaban dan kemajuan Islam pernah mencapai puncak kejayaannya yang tidak dapat disaingi dengan negara lain di dunia. Bahkan menjadi kiblat bagi negara-negara eropa karena keunggulannya dibidang sains, teknologi dan siyasah serta filsafat. Seiring perjalanan waktu kejayaan itu semakin pudar akibat mengalami kemunduran sehingga berbalik 180 derajat dari prestasi yang pernah dicapai. Wajah baru dari dunia Islam seakan berganti karena pragmatasi teologi dan percaturan politik semakin tajam belum lagi para pemikir Islam tidak lagi memperlihatkan kemajuannya akibat kepentingan yang begitu tajam untuk hasrat pribadi dan golongan.

Awal mula konflik bermula pada kasus perang siffin pada tahun 657 M sealigus pergolaan politik di saqifah bani Saidah dengan tujuan dapat melakukan berbagai kritikan atas krisis kepemimpinan setelah Nabi saw wafat. Dan itupulah yang menjadi permulaan munculnya berbagai faksi diberbagai kalangan baik dibidang politik maupun teologi paham keagamaan yang pada akhirnya membawa perbedaan dari kalangan sunni, syiah

dan khawarij. Harmonisasi dikalangan Ulama teologi mulai memperlihatkan perbedaannya sampai pada perbedaan politik yang berujung pada pembunuhan tokoh agama dan perang saudara. Gambaran inilah yang memperburuk citra Islam dalam dunia internasional sekaligus menjadi masa lalu yang suram tanpa arah. Untuk mengembalikan moment tersebut maka dibutuhkan keseriusan para tokoh agama untuk mengembalikan kekuatan Islam seperti yang pernah dilakukan Rasulullah saw.

Kemoderenan yang dibangun Rasulullah saw sewaktu di Madinah tidak dapat lagi dikembalikan kejayaannya sebagai ciri khas keunggulan Islam. Setelah wafatnya Nabi saw pranata sosial semakin memperlihatkan perubahannya dalam dunia Islam khususnya di timur tengah sehingga umat Islam seakan belum siap menerimanya yang memudahkan masuknya dunia Barat untuk mengembangkan paham dan ajarannya. Hanya saja, dibalik sisi kemunduran yang dialami dunia Islam masih ditemukan peluang untuk mengembangkan sains dan teknologi terutama di awal pemerintahan Muawiyah di barat dan pemerintahan Abbasiyah di Timur. Peluang mengembangkan ajaran Islam masih terlihat karena masih ditemukan aktualisasi peradaban yang memunculkan potensi kemajuan dalam dunia Islam.

Pada abad ke 15 Masehi, situasi justru semakin memprihatikan karena tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuannya bahkan pemikiran dalam dunia Islam mengalami stagnasi, belum lagi diperhadapkan dengan banyaknya sistem taklid sehingga terjadi kebuntuan dalam berpikir mereka. Belum lagi supremasi politik Islam mengalami berada diambang kehancuran dan sangat mengkhawatirkan di akhir abad ke XIX karena peradaban sudah berada pada anti klimaks. Maka jalan yang harus ditempuh untuk mengembalikan situasi tersebut hanya dengan cara melakukan pembaharuan pemikiran agar dunia Islam dapat berkembang. Trik tersebut diambil agar terjadi peralihan isu yang dimotori oleh para pemikir Islam dalam rangka merebut kembali kejayaan Islam di tangan para pembaharu. Konsep yang diusung dalam melakukan pembaharuan itu mengenai mempererat hubungan kenegaraan dengan dunia Islam. Konsep tersebut ternyata mendapat respon positif dari kalangan pemikir Islam dan pemerintah.

Namun demikian, respon terhadap ide tersebut tidak sepenuhnya disetujui dari berbagai kalangan baik dari pemikir Islam kontemporer maupun para teolog. Perbedaan tersebut muncul karena persepsi mereka tentang ide pembentukan negara yang disemangati sistem kemoderenan di satu sisi dan sistem klasikal atau ke khalifahan pada

sisi yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa wacana pembentukan negara berdasarkan ke khalifahan bukan harga mati karena respon tersebut menjadi pro dan kontra dikalangan pemikir dunia Islam. Konsep ke khalifahan yang pernah memperlihatkan kejayaannya menjadi referensi dalam kajian kenegaraan bukan suatu hal yang mustahil untuk bisa dikembangkan. Hanya saja konsep tersebut akan mendapatkan tantangan terlebih akibat kemajuan dunia Barat yang menjadi kiblat dari berbagai peradaban.

II. PEMBAHASAN

A. Pemikiran Politik Islam

Konsepsi politik merupakan aturan yang mengadopsi sistem kekuasaan negara baik terhadap sumber otoritasnya maupun mekanisme pengaturannya. Pada awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan yang pernah diraih karena ilmu pengetahuan dan teknologi sangat maju pesat sehingga peradaban Islam berkibar dengan cemerlang. Belum lagi respon pemerintah saat itu terhadap pengembangannya sangat terbuka. Angin segar nampaknya berpihak kepada ilmuan untuk mengembangkan peradaban pada waktu itu tidak hanya dibatasi pada pengembangan ilmu agama akan tetapi dapat mengembangkan sayap pada ilmu lain seakan ruang gerak mereka tidak lagi dibatasi sehingga memudahkan melakukan ekspansi. Perpustakaan negara bait al-hikmah tidak lagi dihiasi dengan referensi keagamaan namun dikombinasikan dengan referensi asing bahkan buku-buku dari Yunani [un didatangkan dalam rangka memperluas cakrawala pengetahuan.

Pada zaman klasik dan pertengahan muncul gagasan dari kalangan politik Islam dan pemikir Islam memberi legitimasi pada sistem kekuasaan dengan kata lain status quo menjadi inspirasi bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai catatan dan perbaikan. Gagasan tersebut diutarakan karena kelemahan masyarakat dan keterbatasan dalam argumentasinya sehingga kehendak Negara lebih mudah untuk dieksekusi. Ternyata ide-ide tersebut banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Hanya saja, keuntungannya masih memprioritaskan penerapan akidah Islam sebagai sumber inspiratif dalam mengemukakan argumentasi kenegaraan. Para pemikir Islam mengemukakan bahwa Negara didirikan agar pemenuhan kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi disamping kebutuhan spiritual masyarakat

Ibnu Taimiyah dalam argumentasinya mengemukakan bahwa kewenangan pemimpin merupakan anugerah yang diberikan Allah swt dalam mengelola pemerintahan agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Baginya, konsep khalifah bukan merupakan keniscayaan akan tetapi tidak lebih dari wakil Allah swt di bumi untuk mengelola alam dan lingkungan agar kehidupan dapat berjalan sesuai aturan Allah swt. Bagi Ibnu Taimiyah, kepemimpinan merupakan harga mati yang harus diadakan bahkan sekalipun pemimpin zalim harus dipilih dalam rangka mewujudkan tatanam kehidupan daripada rakyat hidup dalam suatu negara diorganisir untuk mewujudkan kebutuhannya.

Berbeda dengan Mawardi, dia lebih menekankan pada aspek kausalitas bahwa kewenangan pemimpin tidak lebih dari kontrak sosial sehingga akan melahirkan hubungan timbal balik dari pemimpin kepada rakyatnya. Gagasan tersebut sudah dikemukakan oleh Mawardi jauh sebelum lahirnya pemikir Barat dalam kaitannya dengan teori kenegaraan. Cara berpikir Mawardi tentang konsep kenegaraan sangat universal karena tidak terpacu pada satu asumsi akan tetapi memberi kebebasan, sehingga penguasa dapat diturunkan dari mahkota kekuasaannya apabila tidak lagi mampu mengemban amanah dan tidak sejalan dengan kehendak rakyatnya.

Pada masa pertengahan abad ke XIII M sekaligus awal jatuhnya kekuasaan Abbasiyah dan mulailah muncul kecemasan Umat Islam akibat karena kelemahan kepemimpinan yang selalu berkiblat kepada paham Barat. Konsep kekhalifahan yang digagas sebelumnya mulai dihilangkan dan kepemimpinan hanya bersifat sentralistik bagi semua umat Islam. Disintegrasi politik menjadi ancaman bagi umat Islam karena kekuasaan pusat memperlihatkan kelemahannya belum lagi dibayangi kekuasaan desentralistik disamping sentralistik yang dapat membuat benturan kekuasaan. Belum lagi kekuasaan Eropa sudah membayangi kepemimpinan kerajaan dan Dinasti akibat kemerosotan di bidang ekonomi.

Sebagai respon dari bayang-bayang tersebut, maka umat Islam mulai memperlihatkan kritiknya agar terbebas dari ketakutan. Asumsi yang dikembangkan bahwa kemunduran Islam terjadi bukan karena faktor internal akan tetapi banyak dipengaruhi dari doktrin luar yang memberi penekanan yang berlebih sehingga paham keislaman hendak dilemahkan. Maka umat Islam harus melakukan revitalisasi dalam rangka mengemban kejayaan Umat Islam sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi

saw dan sahabatnya. Gerakan revitalisasi mulai digerakkan diberbagai wilayah dunia Islam dan mulai melakukan perlawanan untuk mengembalikan kemurnian ajaran Islam

Puncak kemajuan Barat pada abad XIX M yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menyemangati umat Islam agar bangkit kembali dan mulai memunculkan paham yang berbeda dengan Barat mengenai konsep Negara. Pemikir Islam mulai masuk pada konsep negara yang tidak bisa dipisahkan dengan agama. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia sehingga negara harus berorientasi ketuhanan bukan hanya berorientasi kemanusiaan. Pelopor gerakan ini diantaranya Al-Maududi, Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, dan Muhammad Rasyid Ridha. Mereka getol memperjuangkan pengembalian negara berbasis keagamaan seperti yang pernah dicontohkan Rasulullah saw. Mereka tidak mau terjebak dengan paham Barat karena ajaran Islam sangat universal yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Sistem kekhilafahan merupakan konsep yang sudah matang. Berdasarkan pemikiran mereka hanya konsep agama yang dapat menyelamatkan negara dari bayang-bayang kehancuran. Universalitas Islam yang dimiliki mampu membawa ersatuan bagi manusia karena Islam tidak mengenal diskriminasi suku, agama, dan budaya, namun Islam juga mengakui adanya perbedaan perlakuan politik berdasarkan agama.

Dalam politik keislaman, hak untuk memilih dan dipilih merupakan dimensi yang harus dimiliki setiap individu. Kepala negara harus berasal dari kalangan Islam tidak boleh diambil dari luar. Untuk menduduki suatu jabatan, calon kepala negara tidak dibenarkan melakukan kampanye politik untuk menjatuhkan seseorang karena sangat bertentangan ajaran Islam. Bagi mereka, suatu keputusan tidak harus diambil secara mayoritas akan tetapi boleh diambil berdasarkan pandangan kelompok pada majelis syuro, bahkan pendapat minoritas boleh dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kepala negara harus dari kalangan Islam tidak boleh diambil selainnya. Namun teknik pemilihannya tidak dibatasi oleh waktu dan ruang sehingga kepala negara dapat menjabat dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam pandangan Ali Abd. Raziq bahwa Islam tidak mengajarkan metode menjalankan pemerintahan dan kapasitas Nabi hanya sebagai pembawa risalah untuk membawa kebahagiaan kehidupan di akhirat. Beliau mengkategorikan khilafah tidak punya sangkut paut dengan kenabian. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan ada pada kepala pemerintahan atau biasa disebut khalifah sedang urusan umat diserahkan kepada

Nabi yang harus ditaati. Ulil amri dalam pandangan Ali Abd. Raziq merupakan tokoh agama yang hidup pada masa Nabi manapun sesudahnya sehingga mendirikan kekhalifaan tidak urgen dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun hadis Nabi yang mengatakan *الامة من قريش* (pemimpin diambil dari kalangan Quraisy) dipahami bukan dalam konteks mendirikan khilafah akan tetapi sebagai bentuk ketaatan agar terhindar dari kemaksiatan. Beliau juga mengaku bahwa memang perlu ada yang mengurus dan mengatur manusia karena itu bagian dari fitrah akan tetapi bukan dalam bentuk khilafah terlepas apa dari kalangan yahudi, nasrani atau golongan tertentu. Pemerintahan itu boleh dalam bentuk konstitusional, boleh juga dalam bentuk monarki.

Bagi Ali Abd. Raziq bahwa Muhammad saw diutus oleh Allah swt untuk menyampaikan risalah yang didalamnya memuat persoalan kehidupan kemasyarakatan yang notabene sangat diperlukan kapasitas seseorang untuk mengataurnya disamping fungsi Islam sebagai agama yang bersifat universal maka tentu agama tidak dapat lepas dari persoalan keamsyarakatan. Fungsi kenabian dan fungsi kekhalifahan harus dipisah agar tidak terjadi benturan. Nabi diutus kapasitasnya sebagai pembawa risalah seperti nabi-nabi terdahulu tentu bukan bermaksud mendirikan negara. Hanya saja fungsi tersebut tentu ada kesamaan dengan tugas pemimpin atau raja misalnya mengatur strategi perang, mengadili sengketa.

B. Pemikiran Teolog

Seperinggalan Rasulullah saw muncul berbagai pro dan kontra terhadap model kepemimpinan yang akan dijalankan, tarik menarik antara satu sahabat dengan sahabat lain menyodorkan konsep yang ditawarkan. Puncaknya pada masa kekhalifaha Ali bin Abi Thalib yang tidak sedikit menuai protes. Keadaan tersebut mendorong terhadap munculnya paham syiah yang kemudian menjadi paham teolog yang sangat panatik dengan kelompok Ali bin Abi Thalib pada pemerintahan Muawiyah dan Abbasiyah.

Lahirnya tologi syiah sebagai respon ketidak percayai terhadap kepemimpinan setelah wafatnya Nabi saw. Padahal dalam keyakinan mereka bahwa yang berhak menjadi pemimpin hanya Ali dan keluarganya namun tidak mendapatkan dukungan pada waktu itu. Syiah sendiri merupakan kelompok fanatisme beragama. Dalam pandangan syiah bahwa pemerintahan yang sah sepeninggalan Nabi saw adalah Ali bin Abi Tahlib dan lainnya itu hanya merupakan kudeta politik. Dalam pahamnya, kepemimpinan harus

berbentuk Imamah karena didukung dengan konteks Al-Qur'an dan hadis. Dalam paham imamah bahwa yang diakui kepemimpinannya hanya Ali beserta keluarganya. Namun pada akhirnya aliran syiah juga mengalami sekte-sekte dalam pahamnya.

Kepanitian terhadap paham yang dibawa oleh syiah menjadi rukun tersendiri dalam sistem pemerintahan bahkan menjadi sebuah teologi. Dalam pahamnya terdapat panca teologi yang menjadi prinsip dalam bernegara. Yaitu; *pertama* prinsip ketauhidan bahwa sistem pemerintahan baik dalam bentuk khalifah maupun bentuk lain harus berorientasi pada ketuhanan sebagai landasan bernegara. *Kedua* prinsip kenabian yang dibawa oleh Rasulullah saw. Bahwa sistem pemerintahan harus berjalan sesuai yang diajarkan Rasulullah saw agar tidak mudah terdoktrin dengan paham lain. *Ketiga* prinsip al-Ma'ad yakni suatu paham bahwa akan terjadi proses kebangkitan dihari kemudian yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. *Keempat* prinsip keimanan dalam keadilan tuhan yaitu suatu paham bahwa keadilan menjadi skala prioritas dalam kepemimpinan agar terjadi penyerataan. Keadilan tuhan merupakan model yang harus dikembangkan supaya tidak terjadi dikotomi antara yang satu dengan yang lain. *Kelima*, percaya pada ketuhanan. Prinsip tersebut menjadi hak mutlak yang harus dipenuhi baik dalam perbuatan maupun dalam keyakinan.

Dalam teologi lain muncul paham Sunni, paham ini biasa disebut dengan kelompok ahlu Sunnah wal jamaah yang lebih menekankan pada aspek ketauhidan dengan mengacu pada Alquran dan hadis. Hanya saja terdapat berbagai mazhab dalam paham sunni yang bersifat fundamental sehingga sulit dipengaruhi dari paham luar. Ciri perbedaan yang muncul dalam paham ini pada persoalan ibadah bukan pada aspek keyakinan seperti yang dikembangkan kelompok Syiah. Ketika suatu ajaran bertentangan dengan Alquran dan hadis tanpa dalil lain yang mendukung maka paham sunni menolaknya.

Dalam kancah politik aliran syiah dan sunni sering terjadi konflik yang berujung pada embargo satu negara karena perbedaan paham keagamaan. Hal itu dapat disaksikan perseteruan antara Irak sebagai basis Sunni dengan Negara Iran sebagai kelompok syiah. Namun dalam perjalanannya, paham sunni banyak mendapat simpatik dan dukungan dari negara-negara timur misalnya Libanon dan Arab Saudi serta negara-negara lain termasuk Indonesia yang mayoritas banyak menganut paham Sunni kemudian dikembangkan menjadi organisasi keagamaan. Faktor imamah menjadi isu sentral yang dijadikan tola

ukur perbedaan. Teologi Syiah selalu menekankan kemaslahatan umat hanya dapat diperoleh melalui Imam karena terjadi penyatuan antara tuhan dengan umat. Bahkan paham imamah merupakan representasi dari ajaran Alquran sebagai rujukan Umat Islam. Imam merupakan panutan yang harus diikuti untuk mengukur keimanan seseorang. Sementara kaum Sunni lebih berapiliasi kepada alquran yang tentu sangat bertentangan dengan paham syiah.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Syiah tentu banyak yang tidak sejalan dengan sunni dan mengambil jalan alternatif untuk membuat teologi baru. Teologi khawarij yang tadinya mendukung kepemimpinan syiah sudah mulai mengambil jarak bahkan menjadi oposisi terhadap kepemimpinan Ali dan kawan-kawan. Peristiwa perang shiffin yang berujung dengan arbitrase menjadi cikal bakal munculnya paham khawarij. Persoalan yang mengemuka karena pemahaman tentang khilafah yang tidak membuahkan hasil. Bagi khawarij, kelompok Ali dan pengikutnya tidak lebih dari bentuk kekafiran karena memilih hakim tanpa kehendak Allah swt. Sikap radikalisme juga diperlihatkan kelompok khawarij terhadap pemerintahan Ali, karena semua kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah selalu ditolak oleh ekstrimisme khawarij bahkan berujung pada pemberontakan.

Kelompok khawarij juga sangat kontradiktif dengan kepemimpinan Muawiyah karena bahkan menganggapnya sebagai kafir karena kekuasaan diperoleh dengan cara tidak sah sehingga hampir disebut bahwa hanya sekte khawarij saja yang benar karena menyalahkan semua kelompok-kelompok yang dan sangat mudah mengkafirkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kelompok khawarij bukanlah representasi dari kelompok agama akan tetapi ambisiisme yang muncul untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara mengkafirkan dan menjadi oposisi pada setiap pemerintahan yang ada baik kepada Ali maupun kepada Muawiyah.

III. Penutup

Kejayaan Islam masa lalu merupakan tolak ukur bagi umat Islam dalam mewujudkan sistem pemerintahan terutama masa khalifah Abbasiyah dimana muncul berbagai ilmuwan dan perkembangan sains dan teknologi serta filsafat yang mengharuskan nama Islam. Kejayaan tersebut menjadi tantangan bagi dunia barat karena Umat Islam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Kejayaan tersebut dapat dicapai karena

Islam membuka ruang bagi perkembangan sains, dunia akademik semakin digalakkan, sistem ekonomi memberi angin segar bagi kemajuan negara sehingga banyak menaruh perhatian pada dunia Islam.

Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam sistem pemerintahan tidak ada yang bisa bertahan ketika terjadi perpecahan didalamnya. Munculnya sekte-sekte pada masa khalifah Ali dan Muawiyah menjadi saksi bisu pada sistem pemerintahan bahwa negara dapat direbut dengan cara arbitrase maupun kesepakatan. Hanya saja, metode demikian akan membuka peluang munculnya sengketa dan berakhir pada pembunuhan atau pemberontakan seperti yang dialami oleh kelompok Khawarij.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A'la' al-Maududi, 1993. *The Islamic law and Constitution*, diterjemahkan oleh Dr. Deliar Noer, *Hukum Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet.II, Bandung: Mizan.
- Abdurrahman, D, 2003. *Sejarah Peradaban Islam: Masa Klasik Hingga Moderen*. Yogyakarta: LESFI.
- Boisard. Marcel, 1980. *L'Humanisme De L'Islam*, diterjemahkan oleh Prof.Dr.H.M.Rasijidi, *Humanisme dalam Islam*, Cet,1 Jakarta: Bulan Bintang.
- Esposito. John, 1995. *Islam in Transition, Muslim perspectives*, diterjemahkan oleh Mchus Husein, *Islam dan Pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet, V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Hassan. Ibrahim Hassan, 1989. *Islamic Hystori and culture, From 632-1968*, diterjemahkan oleh Djahdan Hman._Ed.1, *Sejarah dan Kebudayaan Islam : 632-1968*. Cet.1, Jogyakarta : Kota Kembang.
- Hitti, P. K, 2002. *History of the Arabs (R, C, L, Y & D)* S. Riyadi Trans. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Iqbal Afzal, 2000. *Diplomacy of in Early Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Diplomasi islam*, Cet,1. Jakarta: Pusataka al-Kautsar.
- Nasution. Harun,1996. *Islam Rsional ; Gagasan dan Pemikiran*, Cet.IV,Mizan: Bandung.
- Nizar, S, 2009. *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Noer, Delier, *Gerakan Modern Islam di Indoneisa 1900-1942*, I,P3ES : Jakarta, 1980.

Sjadrali. H.Munawir MA, 1993. *Islam dan Tata Negara : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, Jakarta : UI Press.